

**EVALUASI
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021**



**BAPPEDA KOTA MAGELANG
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

COVER	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN	6
D. SASARAN	6
E. RUANG LINGKUP	6
F. SISTEMATIKA DOKUMEN	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN PERUNDANG-UNDANGAN	13
A. KAJIAN PUSTAKA	13
B. KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN	13
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAPPEDA	20
A. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAPPEDA.....	20
B. INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA.....	28
BAB IV CAPAIAN INDIKATOR DAN EVALUASI CAPAIAN	70
A. CAPAIAN INDIKATOR SASARAN DAN PROGRAM TAHUN 2020 TERHADAP TARGET 2020	74
B. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR TAHUN 2020 TERHADAP TARGET RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2016 - 2021	78
BAB V PENUTUP.....	84
A. KESIMPULAN	84
B. SARAN.....	87

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH	2
GAMBAR 2 ARSITEKTUR DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH	2
GAMBAR 3 HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UU. NO. 23 TAHUN 2014.....	15
GAMBAR 4 PEMBAGIAN URUSAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH	15
GAMBAR 5 HUBUNGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH	2
GAMBAR 6 HUBUNGAN PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	2
GAMBAR 7 ALUR DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENSTRA	15
GAMBAR 8 CASCADING KINERJA SASARAN TERWUJUDNYA PERENCANAAN DAERAH PARTISIPATIF BERBASIS DATA YANG AKURAT DAN AKUNTABEL	22
GAMBAR 9 CASCADING KINERJA SASARAN MENINGKATNYA KEMAMPUAN PEMERINTAH MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KEMITRAAN	24
GAMBAR 10 CASCADING KINERJA TUJUAN RENSTRA/ SASARAN STRATEGIS IKU OPTIMALNYA MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG PARTISIPATIF	25
GAMBAR 11 CASCADING KINERJA TUJUAN RENSTRA/ SASARAN STRATEGIS IKU TERWUJUDNYA KONSISTENSI PERENCANAAN JANGKA MENENGAH DENGAN PERENCANAAN TAHUNAN	26
GAMBAR 12 CASCADING KINERJA TUJUAN RENSTRA/ SASARAN STRATEGIS IKU TERWUJUDNYA DOKUMEN PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI, BIDANG FISIK PRASANA DAN BIDANG SOSIAL BUDAYA YANG BERKUALITAS.....	27

DAFTAR TABEL

TABEL 1 TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN RPJMD KOTA MAGELANG TAHUN 2016-2021	7
TABEL 2 SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN RPJMD KOTA MAGELANG 2016 - 2021	8
TABEL 3 PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM OPD DALAM RPJMD KOTA MAGELANG TAHUN 2016 - 2021	10
TABEL 4 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAPPEDA	20
TABEL 5 INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA MAGELANG TAHUN 2016-2021	28
TABEL 6 INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	34
TABEL 7 CAPAIAN INDIKATOR SASARAN	71
TABEL 8 CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	74
TABEL 9 CAPAIAN INDIKATOR SASARAN	78
TABEL 10 CAPAIAN INDIKATOR PROGRA,M	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan suatu proses menentukan apa yang akan dicapai di masa yang akan datang dengan menetapkan tahapan – tahapan yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dan akan di capai dalam jangka waktu yang telah di tentukan.

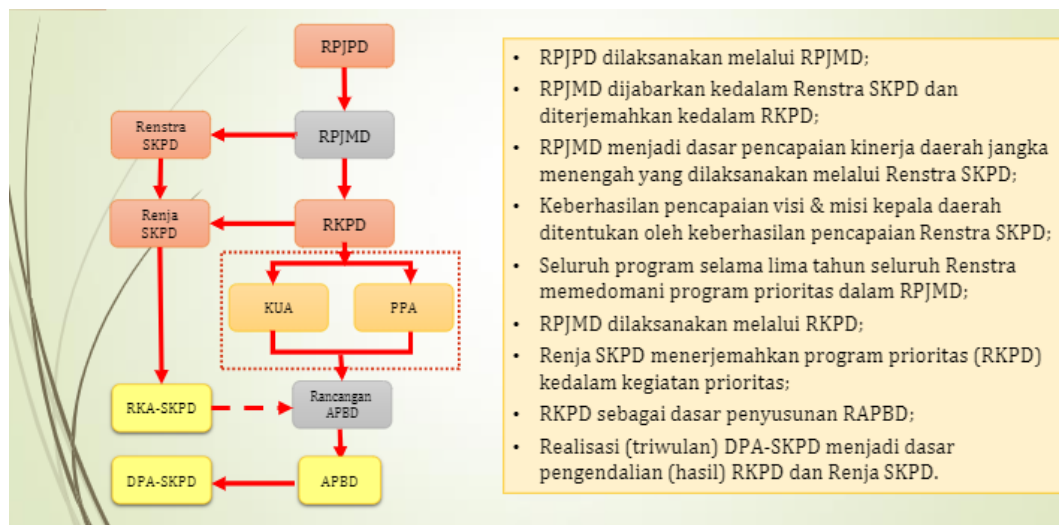
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sesuai jangka waktu pelaksanaannya, rencana pembangunan terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan, tahunan. Cakupan perencanaan pembangunan nasional terdiri dari perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagai amanat Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Rumusan yang diterapkan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah adalah transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

GAMBAR 1
HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH



GAMBAR 2
ARSITEKTUR DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH



Pemerintah Kota Magelang melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Tahun 2005-2025 yang dipayungi dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009. Guna mencapai visi jangka panjang Kota Magelang, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tersebut dibagi kedalam 4 tahap pembangunan, dimana tiap tahap mempunyai tema pembangunan yang melandasi penyusunan rencana pembangunan sesuai waktu pentahapannya. RPJM-D 2005-2010 yang merupakan tahap I RPJP-D 2005-2025 dipayungi dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005, RPJM-D 2010-2015 sebagai pelaksanaan Tahap-II RPJP-D disusun pada tahun 2010-2011 dan dipayungi dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011.

Sementara Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Tahap Ke tiga dipanyungi dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 tahun 2016 tentang RPJM-D Kota Magelang Tahun 2016-2021.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 272 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun Renstra yang berpedoman pada RPJM-D. Materi yang dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah adalah tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Dalam Renstra Perangkat Daerah juga dicantumkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPJM-D. Hal itu sebagai bentuk komitmen perangkat daerah dalam mendukung atau memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJM-D.

Dalam perjalanannya sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang RPJM-D Kota Magelang Tahun 2016-2021, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang telah mengalami perubahan sebanyak 2 kali. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 disahkan dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.13/205/ 112 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kota Magelang Tahun 2016-2021 dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Nomor 050.2/038.a/310 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang tersebut mengalami perubahan pada tahun 2017 sebagai implikasi dari dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sehingga dapat memberikan acuan bagi perencanaan Perangkat Daerah maka di pandang perlu untuk melakukan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Proses manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi pengawasan termasuk di dalamnya monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam rangka memantau sejauh mana target yang ditetapkan dapat dicapai pada tahun yang bersangkutan. Sehingga sangat penting untuk mengevaluasi RENSTRA BAPPEDA dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi pengawasan.

B. DASAR HUKUM

Landasan hukum penyusunan Dokumen Evaluasi Rencana Strategis Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah);
 16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
 17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
 18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Magelang tahun 2005-2025;
 19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031;
 20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021;
 21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 22. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen Evaluasi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang adalah dalam rangka melaksanakan evaluasi pelaksanaan dokumen RENSTRA dan menilai sejauh mana program dan kegiatan berjalan sesuai rencana secara efektif dan efisien. Sedangkan tujuan penyusunan dokumen Evaluasi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang adalah:

1. Mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi tentang capaian sasaran, tujuan dan kinerja OPD tahun 2020;
2. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dan solusinya;
3. Merumuskan evaluasi serta strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA BAPPEDA;

D. SASARAN

Sasaran dokumen Evaluasi RENSTRA BAPPEDA adalah capaian kinerja tahunan BAPPEDA yang disandingkan dengan target dalam RENSTRA BAPPEDA.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pada laporan Evaluasi RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang terdiri dari Ruang Lingkup Substansi yang terdiri dari 3 (tiga) substansi yaitu Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Indikator Program. Tiga substansi tersebut mengacu pada Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah. Berikut penjelasan dari masing- masing substansi.

1. Indikator Tujuan

Indikator Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

TABEL 1
TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN
RPJMD KOTA MAGELANG TAHUN 2016 - 2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan	Cakupan peningkatan kapasitas dan kualitas apartur perencana
2	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung <i>core business</i> perencanaan	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas
3	Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku	Cakupan tertib administrasi dan pelaporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku
4	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif
5	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan
6	Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas
7	Mewujudkan koordinasi, pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik dan prasarana, serta perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
8	Meningkatkan kinerja monitoring	Cakupan Persentase

evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah	rekomendasi monev perencanaan yang ditindak lanjuti yang ditindaklanjuti
--	--

2. Indikator Sasaran

Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

TABEL 2
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
RPJMD KOTA MAGELANG TAHUN 2016 - 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran
1	1. Meningkatnya kapasitas dan makin meratanya aparatur perencanaan	1. Rasio aparatur perencanaan dengan latar belakang pendidikan : a. S1 b. S2 c. S3
		2. Rasio aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran
		3. Cakupan seminar/ Workshop / pelatihan yang diselenggarakan Bappeda
2	1. Tersedianya sarpras yang berkualitas	1. Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas
3	2. Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku	2. Prosentase Administrasi pelaporan yang tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku.
		3. Capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
		4. Capaian kinerja pengelolaan keuangan
		5. % ketersediaan Standar Operasional Prosedur
4	1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif	Musrenbang
		a. Persentase PD yang melaksanakan Musrenbang
		b. Tingkat kehadiran Peserta Musrenbang
		c. Tingkat partisipasi Masyarakat dalam

	dan inovatif	Musrenbang
		d. Tingkat penyelenggaraan Musrenbang tepat waktu
		e. Prosentase usulan program kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir dalam Renja OPD.
		f. Tingkat Implementasi <i>E- Musrenbang</i> Kelurahan;
		g. Persentase usulan masyarakat di <i>E- Aspirasi</i> yang terakomodir dalam Renja PD
		h. Persentase Usulan konsultasi publik yang diakomodir dalam renja OPD
		i. Persentase pokok pokok pikiran DPRD yang diakomodir dalam RKPD
	2. Terwujudnya dukungan data dan informasi terupdate	1. Tingkat ketersediaan Profil Kota Magelang 2. Tingkat aktualitas data dan informasi public
5	1. Terwujudnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	1. Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. Tingkat keselarasan RPJMD dengan Renstra PD 3. Tingkat keserasan Renstra PD dengan Renja PD
6	1. Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas	Rasio ketersediaan dokumen perencanaan bidang ekonomi
		Tingkat implementasi perencanaan bidang ekonomi
	2. Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Fisik Prasarana yang berkualitas	Rasio ketersediaan perencanaan bidang Fisik prasarana
		Tingkat implementasi perencanaan bidang Fisik prasarana
	3. Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial dan Budaya	Rasio ketersediaan perencanaan bidang Fisik prasarana
		Tingkat implementasi perencanaan bidang sosial dan Budaya
7	1. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Ekonomi	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
	2. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Fispra

	bidang Fisik Prasarana	
	3. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Sosial Budaya	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya
8	1. Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi RKPD dan RPJMD	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti
	2. Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Ekonomi	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti
	3. Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Fisik Prasarana	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti
	4. Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Sosial Budaya	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti

3. Indikator Program

Indikator Program Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

TABEL 3
PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM OPD DALAM
RPJMD KOTA MAGELANG TAHUN 2016 - 2021

No	Program	Indikator Program
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	Rasio aparatur perencanaan dengan latar belakang pendidikan : S1 S2 S3 Rasio aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran Cakupan seminar/workshop/pelatihan yang diselenggarakan Bappeda
2	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan
3	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas

5	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku
		Persentase arsip dan risalah
		Persentase Penyelamatan Arsip
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
7	Program perencanaan pembangunan daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPDP
		Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir
		Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik
		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir
8	Program Pengembangan Data/Informasi	Tingkat ketersediaan data profil Kota Magelang
		Tingkat aktualitas data dan informasi publik
		Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan
		Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date
9	Program Perencanaan Bidang Ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi
10	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti
11	Program perencanaan Fisik Prasarana	cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana
12	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni
13	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Tersedianya perumahan dengan lingkungan sehat
14	Program perencanaan sosial budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi

		permasalahan bidang sosial budaya
15	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi
16	Program perencanaan Fisik Prasarana	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang Fisik Prasarana

F. SISTEMATIKA DOKUMEN

Evaluasi RENSTRA yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN PERUNDANG – UNDANGAN
- BAB III TUJUAN,SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN BAPPEDA KOTA
MAGELANG
- BAB IV CAPAIAN RENSTRA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI
- BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. KAJIAN PUSTAKA

Setiap proses manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Evaluasi merupakan bagian dari proses pengawasan. Seberapa besar tingkat capaian dibandingkan target yang telah ditetapkan; apa saja masalah yang ditemui dalam pencapaian target, serta solusi yang diambil dalam rangka penyelesaian permasalahan merupakan langkah-langkah dalam evaluasi. Sementara dalam UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, tahapan perencanaan meliputi Penyusunan Rencana, Penetapan Rencana, Pengendalian Pelaksanaan Rencana, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Dari sisi pengertian secara harafiah, Echols dan Shadly (dalam Thoha, 2003:1) mengemukakan bahwa “kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran.” Menurut pengertian istilah, Thoha (2003:1) mengatakan bahwa “evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh kesimpulan.”

Secara umum, Cross (dalam Sukardi, 2005:1) berpendapat bahwa “evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah tercapai.” Hal ini dijelaskan lagi oleh Sukardi (2015: 1), bahwa definisi tersebut menerangkan secara langsung bahwa evaluasi merupakan proses mendapatkan informasi dan memahami serta mengkomunikasikan hasil informasi tersebut kepada pemangku keputusan. Hal tersebut selaras dengan Wirawan (2011:8-9), yang berpendapat bahwa salah satu tujuan dari evaluasi adalah mengumpulkan informasi, mengukur kinerja, dan menilai manfaat mengenai objek evaluasi yang berkaitan dengan indikator, tujuan, atau standar dalam objek evaluasi.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi capaian RENSTRA BAPPEDA merupakan kegiatan terencana untuk mengetahui tingkat ketercapaian target, permasalahan yang menjadi kendala, serta solusi yang diambil dengan menggunakan instrumen yang berkaitan dengan indikator, tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

B. KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

Landasan hukum penyusunan Dokumen Rencana Strategis Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Pasal (1) disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Sementara dalam Pasal 7 (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Pasal 29 ayat (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.

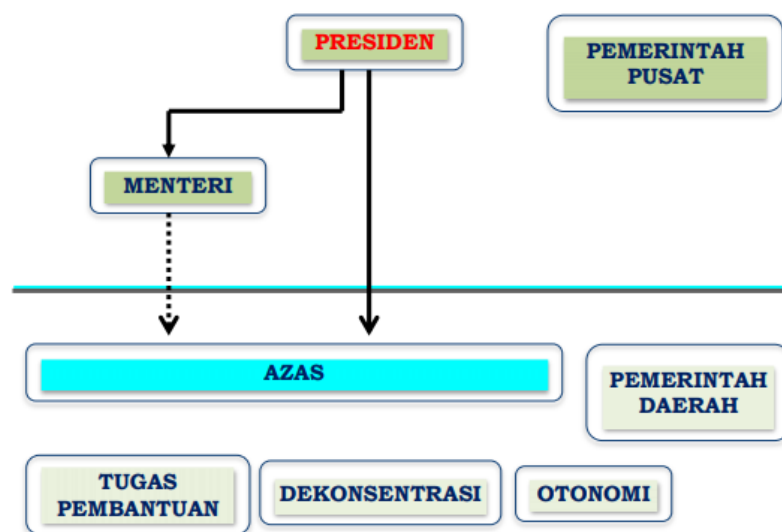
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005-2009, RPJM Nasional II Tahun 2010-2014, RPJM Nasional III Tahun 2015-2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024.
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah digambarkan sebagai berikut:

GAMBAR 3
HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014



Sedangkan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibagi berdasarkan urusan sebagaimana berikut:

GAMBAR 4
PEMBAGIAN URUSAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMERINTAH DAERAH



Dalam hal perencanaan, agar terjaga kesinambungan pembangunan antara pusat dan daerah, maka dirancang hubungannya sebagai berikut:

GAMBAR 5
HUBUNGAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH



4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Sedangkan kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran adalah sebagaimana berikut:

GAMBAR 6
HUBUNGAN PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Pasal 2 menyebut bahwa Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:

- a. koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan;
- b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan;
- c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan;
- d. pendidikan dan pelatihan; dan
- e. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Pasal 13 ditegaskan Perencanaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e meliputi Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Tahunan sesuai peraturan perundang-undangan.

Terkait evaluasi diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Pedoman serta standar pemantauan dan evaluasi urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disusun oleh Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya; dilanjutkan dalam ayat (2) Penyusunan pedoman pemantauan dan evaluasi urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan dengan Menteri.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

Pasal 1 : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3: Pasal 3 Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 12: (1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); (2) Rancangan Renstra-SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bappeda; (3) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi

rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagai masukan.

BAB IV RENSTRA DAN RENJA SKPD Pasal 25: (1) SKPD menyusun Renstra-SKPD. (2) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. (4) Kecamatan atau sebutan lain sebagai SKPD menyusun Renstra kecamatan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota. Pasal 26 Renstra-SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.

Bagian Kedua tentang Evaluasi dalam Pasal 46 (3) Bupati/walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota. Sedangkan dalam pasal 47 Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi evaluasi terhadap : (a) kebijakan perencanaan pembangunan daerah; (b) pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan (c) hasil rencana pembangunan daerah.

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Pasal 4 Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD. Dalam Pasal 5 Penyelenggaraan SAKIP meliputi: (a) rencana strategis; (b) perjanjian Kinerja; (c) pengukuran Kinerja; (d) pengelolaan data Kinerja; (e) pelaporan Kinerja; dan (f) reviu dan evaluasi Kinerja.

Bagian Kedua Rencana Strategis dalam Pasal 6 (2) SKPD menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan. (3) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.

Bagian Keempat Pengukuran Kinerja Pasal 15 (1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 melakukan pengukuran kinerja. (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja.

Pasal 16 Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan cara: (a) membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja

dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan; (b) membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD.

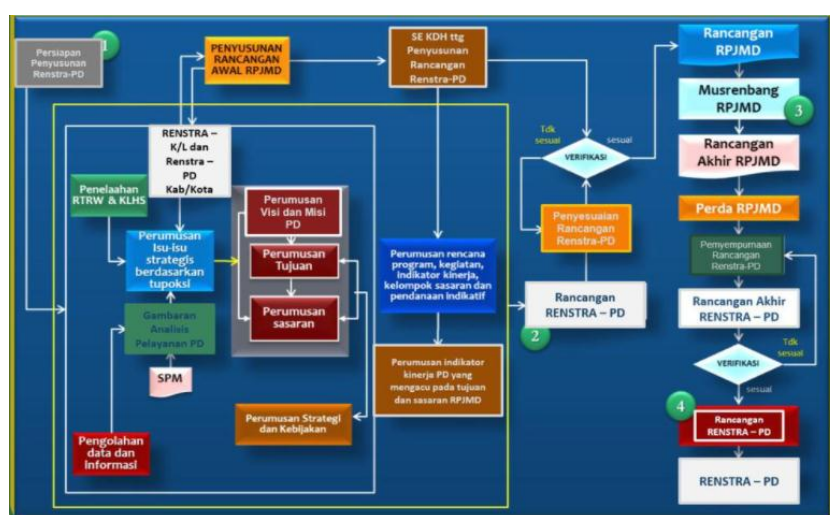
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 13 Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pasal 15 (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. (2) Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Pasal 16 (1) Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disusun dengan tahapan: persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; perumusan rancangan akhir; dan penetapan.

GAMBAR 7
ALUR DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENSTRA OPD



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.1. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

TABEL 4

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

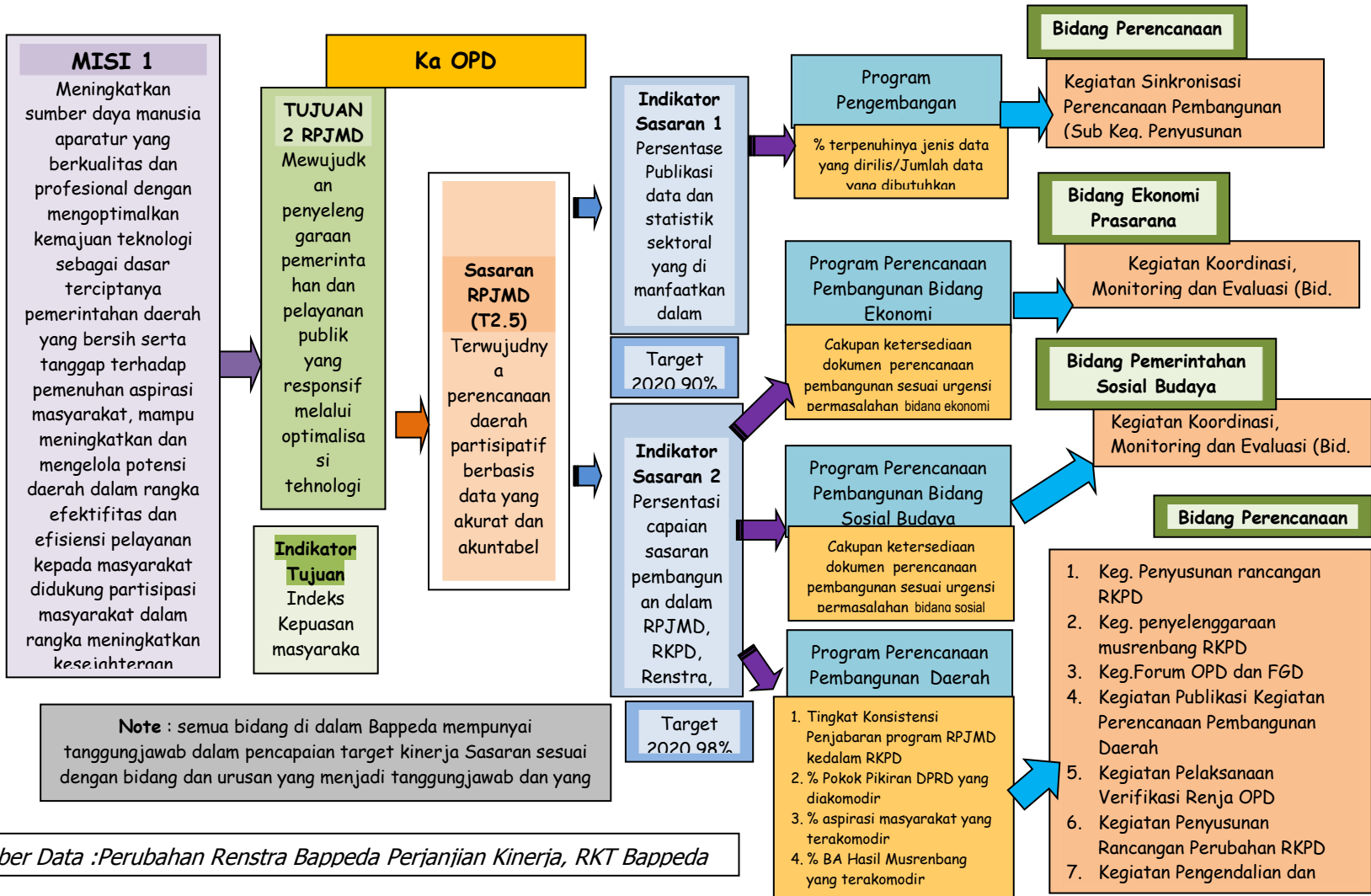
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan	Meningkatnya kapasitas dan makin meratanya aparatur perencanaan	1. Meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya aparatur perencanaan Bappeda melalui bintek, diklat, pendidikan formal perencanaan serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi	1. Memfasilitasi aparatur perencanaan untuk mengikuti pendidikan formal perencanaan, bintek, seminar, diklat workshop terkait dengan perencanaan 2. Melaksanakan fasilitasi bagi aparatur perencanaan dan karyawan untuk mengikuti bintek, seminar, diklat, workshop, konsultasi dan koordinasi terkait dengan teknis pekerjaan
		2. Pengembangan sistem informasi perencanaan dan data base perencanaan berbasis teknologi informatika	1. Pengembangan fitur fitur SIPPD serta website Bappeda
3. Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku	Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku.	1. Penyediaan dan implementasi <i>Standart Operating Procedure (SOP)</i> dalam optimalisasi kinerja Perencanaan 2. Peningkatan pengelolaan administrasi, data dan ke-arsipan yang didukung dengan sarana prasarana yang cukup dan staf dengan kompetensi pendidikan yang memadai untuk mendukung kegiatan perencanaan 3. Mengelola anggaran dengan lebih efisien,	1. Melaksanakan pengelolaan administrasi 2. Melaksanakan pengelolaan dan tertib administrasi arsip serta manajemen aset OPD 3. Melaksanakan pengembangan capaian kinerja kegiatan dan kinerja keuangan OPD secara tertib, lancar dan tepat waktu

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		efektif dan akuntabilitas dengan memperjelas arah kebijakan organisasi dalam penggunaan anggaran	
4. Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya kualitas perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dan inovatif	<ul style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan b. Meningkatkan fasilitasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah c. Peningkatan komitmen dan konsistensi pemerintah untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan 	Penyelenggaraan sistem Perencanaan Pembangunan daerah yang partisipatif, akuntabel dan transparan, dalam mewujudkan dokumen RKPD yang berkualitas
	Terwujudnya dukungan data dan informasi <i>ter-update</i>	1. Meningkatkan kualitas dan dukungan data informasi serta kearsipan bagi pengua-tan penyusunan perencanaan pembangunan	Penyusunan data daerah sebagai bahan analisa perencanaan dan pengambilan kebijakan
		2. Peningkatan pemanfaatan tehnologi informatika sebagai sumber data dan informasi dalam rangka mendukung penyusunan produk - produk perencanaan serta publikasi informasi dan produk perencanaan pembangunan sehingga lebih mudah di akses oleh masyarakat dan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Publikasi proses dan hasil perencanaan pembangunan melalui webiste bappeda

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
5. Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Terwujudnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkeadilan	Penyusunan dokumen tahunan yang konsisten dengan dokumen jangka menengah
6. Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, fisik prasarana & sosial budaya yang berkualitas	Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas	Meningkatkan kualitas produk dan dokumen - dokumen perencanaan yang di dukung dengan kerjasama antar lembaga perencanaan baik propinsi maupun pusat dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan swasta	Penyusunan Dokumen perencanaan bidang ekonomi yang relevan untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu bidang ekonomi pada skala kota

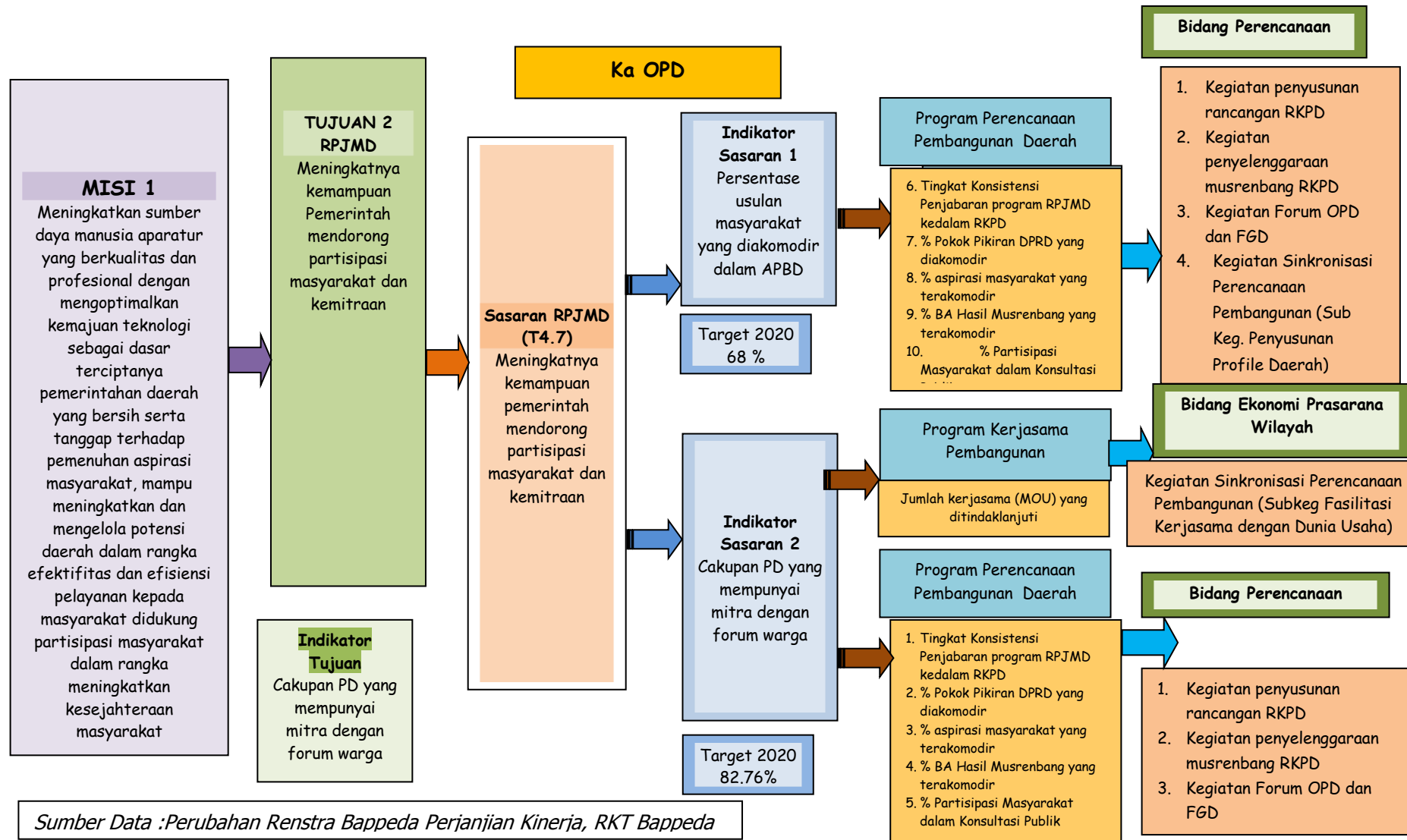
GAMBAR 8

Cascading Kinerja Sasaran Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel



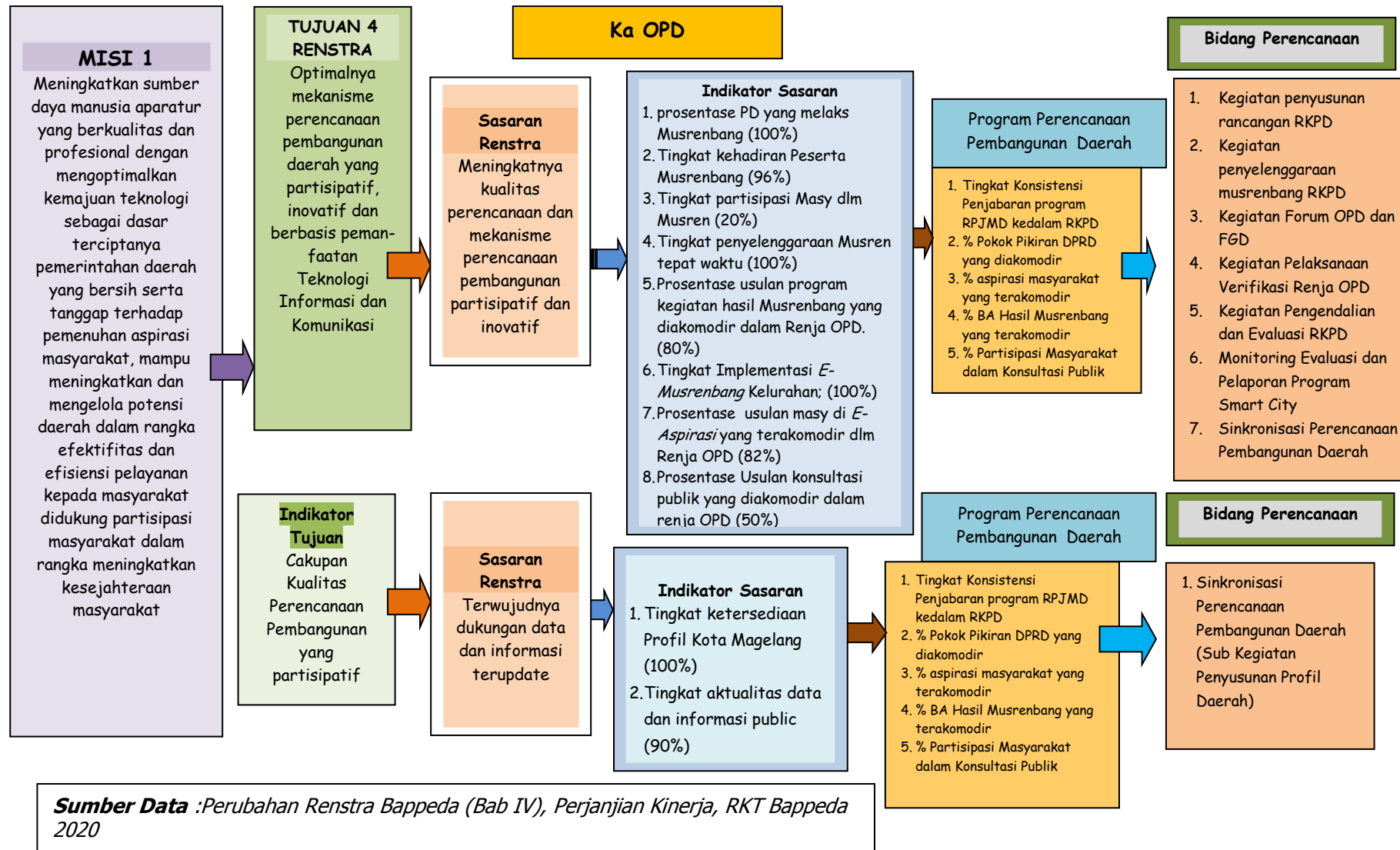
GAMBAR 9

Cascading Kinerja Sasaran Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan

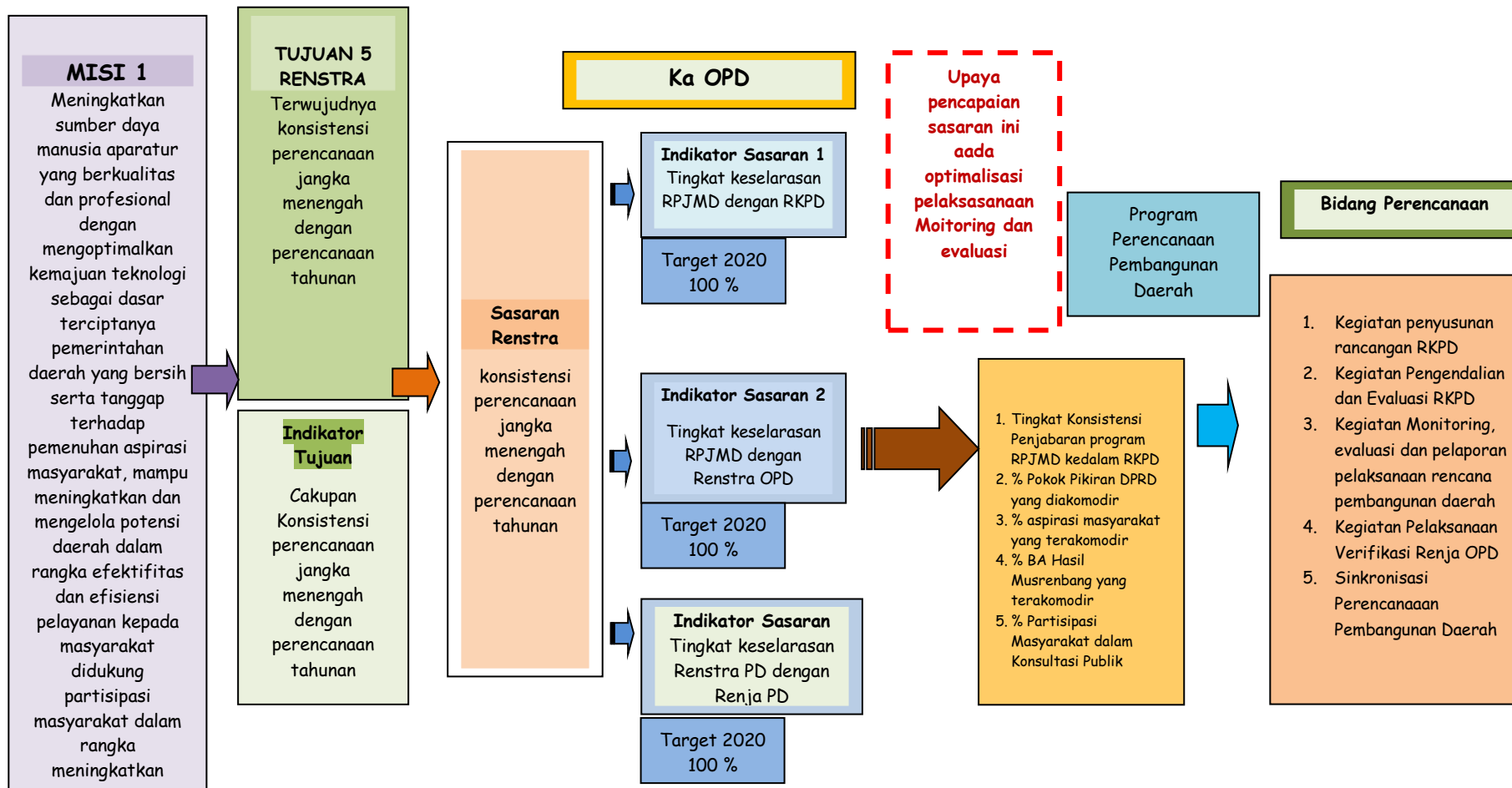


Gambar 10

Cascading Kinerja Tujuan Renstra/Sasaran Strategis IKU Optimalnya mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi



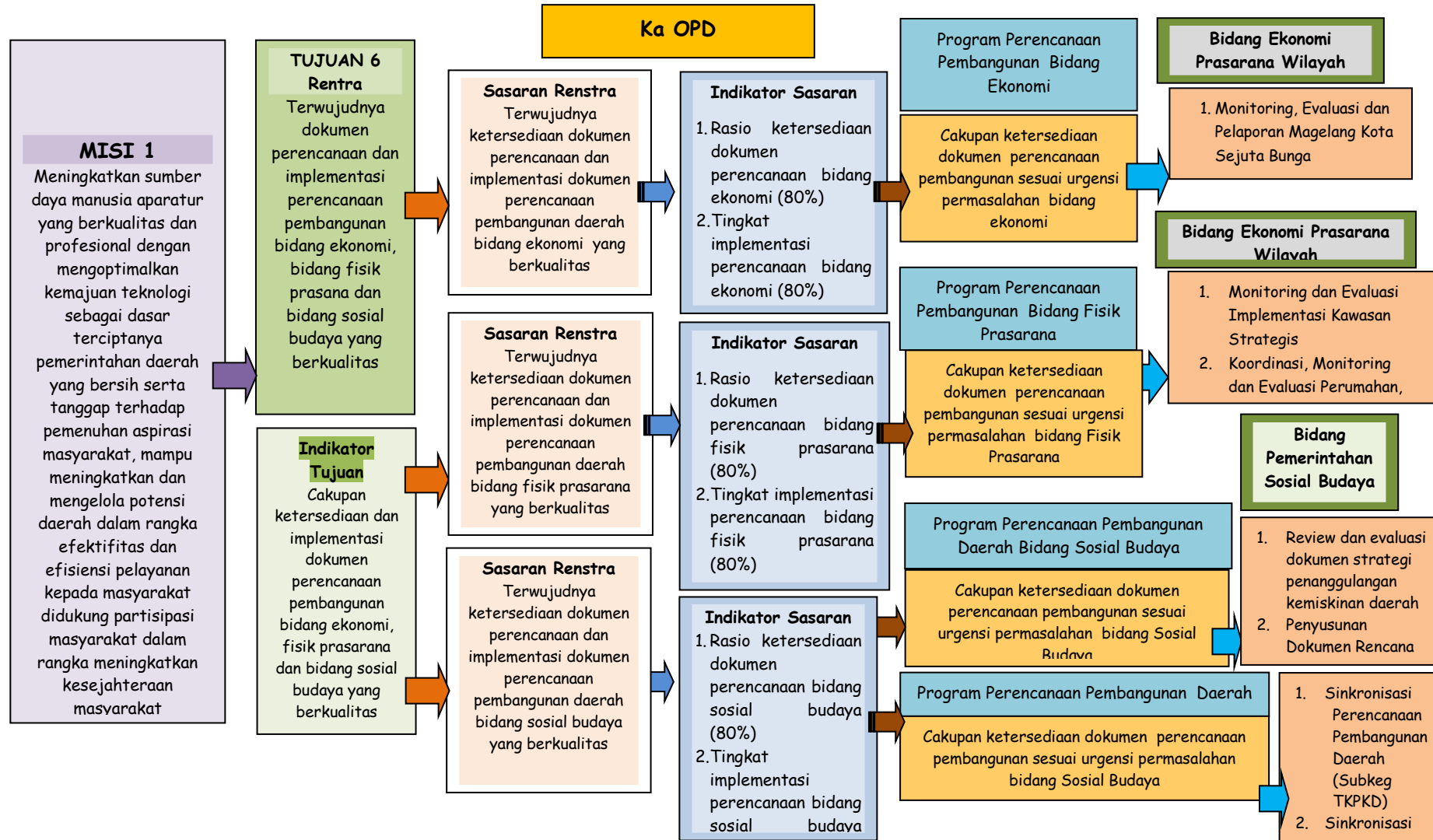
Gambar 11
Cascading Kinerja Tujuan Renstra/Sasaran Strategis IKU Terrwujudnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan



Sumber Data :Perubahan Renstra Bappeda (Bab IV), Perjanjian Kinerja, RKT Bappeda 2019

Gambar 12

Cascading_Kinerja Tujuan Renstra/Sasaran Strategis IKU Terwujudnya dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas



Sumber Data :Perubahan Renstra Bappeda (Bab IV), Perjanjian Kinerja, RKT

1.2. INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA MAGELANG TAHUN 2016-2021

**TABEL 5
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Definisi Operasional	Target Kinerja Tujuan						SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1.	Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan	Cakupan peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur perencanaan	% aparatur perencana berdasarkan pendidikan ditambah % aparatur perencana yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran ditambah % cakupan seminar/workshop/ pelatihan di bagi 4	66.25%	65.75%	68%	68.75%	69.25%	70.25%	Meningkatnya kapasitas dan makin meratanya aparatur perencanaan	1. Rasio aparatur perencana-an dengan latar belakang pendidikan : d. S1 e. S2 2. Rasio aparatur perencana-an yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran 3. Cakupan seminar/ Workshop / pelatihan yang diselenggarakan Bappeda
2	Meningkatkan kuali-tas sarana dan prasa-rana dalam mendu-kung <i>core business</i> perencanaan	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas	91%	92%	93%	94%	95%	96%	Tersedianya sarpras yang berkualitas	1. Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas
3	Meningkatkan koor-dinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan	Cakupan tertib administrasi dan pelaporan yang sesuai dengan aturan yang	% Administrasi pelaporan yang tepat waktu sesuai aturan yang berlaku di-tambah % Capaian	76.33%	80.33%	84.67%	88.67%	92.33%	92.33%	Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang	1. Prosentase Adminis-trasi pelaporan yang tepat waktu & sesuai aturan yang berlaku. 2. Capaian

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Definisi Operasional	Target Kinerja Tujuan						SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku	berlaku	kinerja pengelolaan keuangan ditambah % ketersediaan SOP di bagi 3							berlaku	akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
											3. Capaian kinerja pengelolaan keuangan 4. % ketersediaan Standar Operasional Prosedur
4.	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	% usulan program kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir dalam Renja OPD ditambah % pokok pokok pikiran DPRD yang yang diakomodir dalam RKPD ditambah % Usulan konsultasi publik yang diakomodir dalam renja OPD ditambah % usulan masyarakat di <i>E- Aspirasi</i> yang terakomodir dalam Renja PD dibagi 4	47.5%	51.25%	57.5%	62.5%	70%	75%	1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dan inovatif	Musrenbang 1.Persentase PD yang melaksanakan Musrenbang 2.Tingkat kehadiran Peserta Musrenbang 3.Tingkat partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang 4.Tingkat penyelenggaraan Musrenbang tepat waktu 5.Prosentase usulan program kegiatan hasil Mus-renbang yang diakomodir dalam Renja OPD. 6.Tingkat Implementasi <i>E- Musrenbang</i> Kelurahan;

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Definisi Operasional	Target Kinerja Tujuan						SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
											7. Persentase usulan masyarakat di <i>E- Aspirasi</i> yang terakomodir dalam Renja PD
											8. Persentase Usulan konsultasi publik yang diakomodir dalam renja OPD 9. Persentase pokok pokok pikiran DPRD yang yang diakomodir dalam RKPD
										2. Terwujudnya dukungan data dan informasi terupdate	1. Tingkat ketersediaan Profil Kota Magelang 2. Tingkat aktualitas data dan informasi publik
5	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	% Tingkat keselarasan Renstra PD dengan Renja PD ditambah% Tingkat keselarasan RPJMD dengan Renstra PD ditambah % Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD dibagi 3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	1. Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. Tingkat keselarasan RPJMD dengan Renstra PD 3. Tingkat keserasan Renstra PD dengan Renja PD

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Definisi Operasional	Target Kinerja Tujuan						SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
6.	Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	% implementasi perencanaan bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasana ditambah % ketersediaan dokumen perencanaan bidang ekonomi sosial budaya dan fisik prasana di bagi 2	70%	70%	75%	75%	80%	80%	1. Terwujudnya keter-sediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas	1. Rasio ketersediaan dokumen perencanaan bidang ekonomi 2. Tingkat implementasi perencanaan bidang ekonomi
										2. Terwujudnya keter-sediaan dokumen perencanaan dan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Fisik Prasarana yang berkualitas	Rasio ketersediaan perencanaan bidang Fisik prasarana Tingkat implementasi perencanaan bidang Fisik prasarana
										3. Terwujudnya keter-sediaan dokumen perencanaan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial Budaya	Rasio ketersediaan perencanaan bidang Fisik prasarana Tingkat implementasi perencanaan bidang sosisal dan Budaya

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Definisi Operasional	Target Kinerja Tujuan						SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
7.	Mewujudkan koor-dinasi, pengendali-an kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang Fispra dan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan Bidang Perencanaan, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Ekonomi Prasarana Wilayah dibagi jumlah dan sinkronisasi perencanaan Bidang Perencanaan, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Ekonomi Prasarana Wilayah yang seharusnya	80%	80%	90%	90%	100%	100%	1. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Ekonomi 2. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Fisik Prasarana 3. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Sosial Budaya	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Fispra Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya
8.	Meningkatkan kinerja monitoring evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah	Cakupan Persentase rekomendasi monev perencanaan yang ditindak lanjuti yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi monev Bidang Perencanaan, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Ekonomi Prasarana Wilayah yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi yang diberikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1. Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi RKPD dan RPJM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Definisi Operasional	Target Kinerja Tujuan						SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
										2. Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Ekonomi	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti
										3. Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Fisik Prasarana	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti
										4. Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Sosial Budaya	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti

1.3. INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

TABEL 6
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ TOLOK UKUR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCAN AAN	TARGET KINERJA PROGRAM						
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
			TAR GET	TAR GET	TAR GET	TAR GET	TAR GET	TAR GET	TAR GET
6	7	8	9	11	13	15	17	19	21
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	Rasio aparatur perencanaan dengan latar belakang pendidikan : a. S1 b. S2 c. S3		a. 53% b. 32% c. 0%	a. 47% b. 34% c. 0%	a. 39% b. 45% c. 0%	a. 37% b. 50% c. 0%	a. 34% b. 53% c. 0%	a. 31% b. 55% c. 0%	a. 29% b. 57% c. 0%
	Rasio aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran		85%	87%	90%	90%	92%	95%	100%
	Cakupan seminar/workshop/pelatihan yang diselenggarakan Bappeda	90%	95%	95%	98%	98%	98%	100%	100%

1	Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah	peserta workshop perencanaan pembangunan bagi pegawai Bappeda Kota Magelang yang mengikuti workshop	41 orang	41	41	45				
2	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan	Tersosialisasikannya perencanaan pembangunan daerah	100 orang	90	100	100				
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah		cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah	peserta workshop perencanaan pembangunan bagi pegawai Bappeda Kota Magelang yang mengikuti workshop	41 orang				45	45	45	45
2	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan	Tersosialisasikannya perencanaan pembangunan daerah	100 orang				100	100	100	100
Program Pelayanan Administrasi perkantoran										
1	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12	12	12	12	12	12	12

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas	90%	91%	92%	93%	94%	95%	96%	97%
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	4 jenis		4		0		4	4
2 Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	4 jenis		4		0		4	4
3 Pengadaan Mebeleur	tersedianya mebeleur gedung kantor	8 item		8	5				
4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung Bappeda	11 jenis		12	12	12	12	12	11
5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	14 jenis		27	27	27	27	27	14
6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	12 jenis	12	11	11	11	11	11	12
7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	12 jenis	12	14	14	14	14	14	12
8 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpeliharanya mebeleur	27 unit	27	12	12	12	12	12	27
9 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	tersedianya kendaraan dinas/operasional					0			

	Prosentase Administrasi dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.		95%	95%	96%	96%	97%	97%	97%
	Capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		cc	cc	b	bb	bb	bb	bb
	Capaian kinerja pengelolaan keuangan		84%	86%	88%	90%	90%	90%	90%
	% ketersediaan Standar Operasional Prosedur		50%	60%	70%	80%	90%	90%	90%
Program Pelayanan Administrasi perkantoran									
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kelancaran jasa surat menyurat	12 bulan	12	12	12	12	12	12
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 bulan	12	12	12	12	12	12
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	27 unit kendaraan	27	27	27	27	27	27

4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium pengelolaan keuangan daerah serta tersedianya laporan keuangan dan pertanggungjawaban bappeda	11 orang & 12 bendel (lap keu dan SPJ bulanan)	11 orang & 12 bendel (lap keu dan SPJ bulanan)	11 orang & 12 bendel (lap keu dan SPJ bulanan)	11 orang & 12 bendel (lap keu dan SPJ bulanan)	11 orang & 12 bendel (lap keu dan SPJ bulanan)	11 orang & 12 bendel (lap keu dan SPJ bulanan)	11 orang & 12 bendel (lap keu dan SPJ bulanan)	11 orang & 12 bendel (lap keu dan SPJ bulanan)
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terwujudnya kebersihan kantor	26 item	26	26	26	26	26	26	26
6	Penyediaan alat tulis kantor	alat tulis kantor	12 bulan	12	12	12	12	12	12	12
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	penggandaan dan barang cetakan	12 bulan	12	12	12	12	12	12	12
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12	12	12	12	12	12	12
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12	12	12	12	12	12	12
10	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	12	12	12	12	12	12	12
11	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	12	12	12	12	12	12	12
12	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honororer	tenaga kontrak/honororer daerah/tidak tetap	12 bulan	12	12	12	12	12	12	12

daerah/tidak tetap										
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	21 jenis			21				
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah		Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	17%	17%	34%	52%	69%	86%	100%	100%
		Persentase arsip dan risalah	80,47%	82%	82%	82%	82%	82%	85%	85%
		Persentase Penyelamatan Arsip	33%	40%	47%	53%	60%	67%	73%	73%
1	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	jumlah pendataan dan penataan arsip	1 kegiatan		1	1	1	1	1	1
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan										
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Dokumen Evaluasi Kegiatan Realisasi Keuangan dan Fisik bulanan	12 laporan	12	12	12	12	12	12	12
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun	5 buku	5	5	5	5	5	5	5
3	Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi	Laporan Prognosis realisasi anggaran	6 buku	6	6	6	6	6	6	6

anggaran									
4	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Dokumen Renja dan Renja Perubahan OPD	2 dokumen	2	2	2	2	2	2
5	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Dokumen RKA dan RKPA OPD	2 dokumen	2	2	2	2	2	2
6	Penyusunan Rencana Strategis OPD	Dokumen Renstra SKPD dan Dokumen Perubahan Renstra OPD	1 dokumen	1	1				
7	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKJI) OPD	Dokumen LKJI Bappeda	1 laporan	1	1	1	1	1	1
8	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunnya Perubahan Renstra OPD	1 laporan				1		
	a. Persentase PD yang melaksanakan Musrenbang			100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Tingkat kehadiran Peserta Musrenbang			90%	90%	94%	94%	96%	98%
	c. Tingkat partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang			10%	10%	15%	15%	20%	25%

	d. Tingkat penyelenggaraan Musrenbang tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	e. Prosentase usulan program kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir dalam Renja SKPD.		60%	60%	70%	70%	80%	80%	80%
	f. Tingkat Implementasi E Musrenbang Kelurahan;		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	g. Persentase usulan masyarakat dalam E Aspirasi yang terakomodir dalam Renja PD		10%	15%	20%	30%	40%	50%	50%
	h. Persentase Usulan konsultasi public yang diakomodir dalam renja SKPD		60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
	i. Persentase pokok pokok pikiran DPRD yang yang diakomodir dalam RKPd		60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
Program perencanaan pembangunan daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPd	100,3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	60	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%	
	Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	65	70%	72%	75%	80%	82%	85%	85%	
	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	25	30%	35%	40%	45%	50%	55%	55%	
	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	72%	74%	76%	78%	80%	82%	85%	85%	
1	Penyelenggaraan musrenbang RKPd	Jumlah peserta Musrenbang	100 orang	100	200	200	200	200	200	1
2	Forum SKPD dan FGD	Jumlah forum SKPD	1 kegiatan	1	1	1	1	1	1	2
3	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Jumlah peserta Musrenbang	29 OPD				29			
	Tingkat ketersediaan data profil Kota Magelang		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tingkat aktualitas data dan informasi publik		50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%
	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	85%	85%	90%	90%	90%	95%	95%	95%

		Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%
1	Penyusunan Profile Daerah	Buku Profil / SIPD per Kecamatan	40 buku		40	40			40	40
Program Perencanaan pembangunan daerah		Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100,3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	60	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
		Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	65	70%	72%	75%	80%	82%	85%	85%
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	25	30%	35%	40%	45%	50%	55%	55%
		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	72%	74%	76%	78%	80%	82%	85%	85%
1	Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah media publikasi	20 buku		20	20	20	20	20	20
		Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		Tingkat keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat keselarasan Renstra PD dengan Renja PD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program perencanaan pembangunan daerah		Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100,3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	60	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
		Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	65	70%	72%	75%	80%	82%	85%	85%
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	25	30%	35%	40%	45%	50%	55%	55%
		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	72%	74%	76%	78%	80%	82%	85%	85%
1	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah dokumen rancangan RKPD	150 buku	150	150	150	150	150	150	150
2	Penetapan RKPD	Jumlah Dokumen Perwal ttg RKPD	150 buku	150	150	150	150	150	150	150
3	Pelaksanaan verifikasi renja SKPD	Jumlah Renja SKPD yang diverifikasi	46 opd	46	46	46	46	46	46	46

4	Penetapan RPJMD	Jumlah perda RPJM	1 Perda	1					1	
5	Penetapan perubahan RKPD	Jumlah dokumen perubahan RKPD	100 buku	100	100	100	100	100	100	1
6	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	Jumlah buku ranc Perubahan RKPD	150 buku	150	150	150	150	150	150	1
7	Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja SKPD	Jumlah perubahan renja SKPD yang diverifikasi	48 opd	48	48	48	48	48	48	1
8	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah buku Renstra SKPD	10 buku	10					1	
9	Penyusunan Review RPJPD	Jumlah kegiatan review RPJPD	1 kegiatan	1	1					
10	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah Buku Standarisasi Harga	300 buku		300	300	300	300	300	300
11	Penyusunan Dokumen Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah	Jumlah buku PWT	10 dokumen							10
12	Pencerahan perencanaan pembangunan daerah	personil program yang handal	67 orang				67		67	
13	Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen kreativitas dan inovasi perencanaan	1 dokumen			1	1		1	

14	Mapping Efektifitas Kinerja Kegiatan Terhadap Pencapaian Indikator Program	Formula dan tolak ukur efektifitas kinerja kegiatan terhadap kinerja program	1 dokumen			1				1
15	Kajian teknokratis RPJMD	Tersusunnya hasil kajian sebagai dasar penyusunan RPJMD	dokumen					1		
16	Konsultasi Publik RKPD	Tersaringnya masukan atas Ranwal RKPD	keg			5	0		5	
17	Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Terevaluasinya RPJMD	dokumen				29			
18	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya laporan dan evaluasi kegiatan sinkronisasi perencanaan pembangunan	Laporan				6	6	6	
19	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Tersusunnya dokumen kajian lingkungan strategis	dokumen				1	1		
20	Penyusunan Indikator Kinerja RPJMD	Tersusunnya dokumen indikator kinerja RPJMD	dokumen			1				
21	Konsultasi Publik RPJMD	Terselenggaranya konsultasi publik RPJMD	OPD				29			

22	Forum OPD dan FGD RPJMD	Terselenggaranya forum OPD dan FGD RPJMD	OPD					29			
23	Pelaksanaan Verifikasi Renstra OPD	terselenggara verifikasi renstra OPD	OPD					29			
24	Penyusunan Rancangan RPJMD	Tersusunnya rancangan RPJMD	1 dokumen							1	
		Rasio Ketersediaan Perencanaan bidang Ekonomi	70%	70%	70%	75%	75%	80%	80%	80%	80%
		Tingkat implementasi perencanaan bidang Ekonomi	70%	70%	70%	75%	75%	80%	80%	80%	80%
	Program Perencanaan Bidang Ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Identifikasi Produk Unggulan daerah	Jumlah dokumen hasil identifikasi	50 Dokumen			50					
2	Pemetaan Potensi Ekonomi Kota Magelang	Jumlah dokumen Mapping Potensi ekonomi Kota Magelang	30 Dokumen		30						
3	Perencanaan Peningkatan jaminan mutu produk pertanian	Jumlah dokumen perencanaan jaminan mutu pertanian	30 Dokumen								

4	Penyusunan Dokumen perencanaan pemasaran produk dan jaringan kemitraan	Jumlah dokumen perencanaan pemasaran	30 Dokumen			30			
5	Penyusunan dok perenc pengembangan jangkauan pemasaran dalam skema e-commerce	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan jangkauan pemasaran	35 Dokumen		35				
6	Penyusunan dokumen perencanaan peningkatan daya saing KUM berbasis ekonomi lokal	Jumlah dokumen perencanaan peningkatan daya saing KUM	30 Dokumen				30		
7	Penyusunan Dokumen Analisis Daya Saing Kota Magelang	Jumlah dokumen analisis daya saing daerah	12 Dokumen						
8	Pengembangan Minapolitan	Jumlah dokumen pengembangan minapolitan	30 Dokumen					30	
9	Masterplan Ketersediaan pangan Kota magelang	Jumlah dokumen masterplan ketersediaan pangan	30 Dokumen						

10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Florikultur	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan florikultur	30 Dokumen	30						
11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Urban Farming	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Urban Farming	30 Dokumen	30						
12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Gunung Tidar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Gunung Tidar	30 Dokumen	30			1			
13	Pengembangan Agribisnis Hortikultura	Jumlah dokumen Pengembangan Agribisnis Hortikultura	30 Dokumen							
14	Perencanaan Pengembangan produk unggulan Pertanian, perikanan, peternakan	Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan produk unggulan Pertanian, perikanan, peternakan	30 Dokumen							
15	Penyusunan Dokumen Master Plan Tenaga Kerja Daerah	Jumlah dokumen Grand Design penciptaan lapangan kerja	30 Dokumen				30			
16	Optimalisasi budidaya perikanan	Jumlah dokumen Optimalisasi budidaya perikanan	30 Dokumen							

17	Rencana Induk pengembangan pertanian	tersedianya dokumen pengembangan pertanian	30 Dokumen							
18	Studi potensi pengembangan industri kreatif	Jumlah dokumen Studi potensi pengembangan industri kreatif	12 Dokumen							
19	Masterplan pengembangan BUMD Kota Magelang	Tersedianya dokumen rencana pengembangan BUMD Kota Magelang	20 Dokumen				0		20	
20	Rencana Induk Kebun Raya Gunung Tidar	Jumlah dokumen Rencana Induk Kebun Raya Gunung Tidar	30 dokumen			30				
21	Penyusunan Dokumen Pengembangan Pertanian Organik	Jumlah dokumen Penyusunan Dokumen Pengembangan Pertanian Organik	32 buku		32					
22	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) ber-NKV	Jumlah dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) ber-NKV	32 buku		32					
23	Penyusunan Sistem Informasi dan Lingkungan	Jumlah buku KLHS	1 kegiatan	1						
24	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sejuta Bunga	tersedianya dokumen tindak lanjut MKSB	30 dokumen			30	30	30	30	30

25	Perencanaan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	tersedianya dokumen peningkatan kualitas lingkungan hidup	30 dokumen							
26	Rencana Aksi Daerah Ketahanan Pangan	Tersedianya dokumen RAD Ketahanan Pangan								
27	Monev Ketahanan Pangan	Tersedianya Dokumen Hasil Monev Ketahanan Pangan						30	30	
28	Review Perda Branding Kota Magelang	Tersedianya dokumen review Perda Branding						30		
29	Perencanaan Pengembangan Industri 4.0	Jumlah dokumen pengembangan industri 4.0						30		
Program Kerjasama Pembangunan		Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	1	1	2	3	4	4	4	4
1	Fasilitasi Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	tersedianya kegiatan pendukung fedep	1 kegiatan	1	1	1			1	4
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi										
Program perencanaan pembangunan daerah		Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100,3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	60	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
	Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	65	70%	72%	75%	80%	82%	85%	85%
	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	25	30%	35%	40%	45%	50%	55%	55%
	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	72%	74%	76%	78%	80%	82%	85%	85%
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Sejuta Bunga	Tersedianya dokumen implementasi dan arahan MKSB	30 buku	30	30				
	Rasio Ketersediaan Perencanaan bidang Fisik Prasarana	70%	70%	70%	75%	75%	80%	80%	80%
	Tingkat implementasi perencanaan bidang Fisik Prasarana	70%	70%	70%	75%	75%	80%	80%	80%
	Program perencanaan Fisik Prasarana	cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis	tersedianya dokumen capaian kawasan strategis				30	30	30	30	30
2	Penyusunan Studi Kelayakan Penataan Terminal Lama Rejomulyo	Tersedianya dokumen studi kelayakan penataan terminal rejomulyo								
3	Monev 100-0-100	tersedianya dokumen capaian terhadap program 100-0-100				30				
4	Monev Strategi Sanitasi Kota	Tersedianya dokumen capaian Strategi Sanitasi Kota							30	
5	Penyusunan Blueprint Universal Design	tersediannya dokumen arahan kebijakan dan strategi penerapan universal access design			30					
6	Review Strategi Sanitasi Kota	tersedianya dokumen perencanaan sanitasi (EHRA, Buku Putih, SSK, MPSS)			1					
7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Manajemen Persampahan	tersedianya dokumen manajemen persampahan				30				

8	Penyusunan Master Plan Air Limbah	tersedianya dokumen rencana pengembangan air limbah						1	
9	Penyusunan Master Plan Drainase Berwawasan Lingkungan	tersedianya dokumen rencana drainase berwawasan lingkungan							30
10	Up Date Data Base Jalan dan Jembatan	Tersedianya data sistem informasi jalan dan jembatan							
11	Review Master Plan Kawasan GOR Samapta	tersedianya dokumen pengembangan kawasan GOR Samapta sisi selatan					1		
12	Masterplan Taman	tersedianya dokumen pengembangan taman kota					1		
13	Masterplan Integrated Transport System (ITS)	tersedianya dokumen rencana pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi							30
14	Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)	tersedianya dokumen pengembangan antisipasi dan proteksi dini terhadap kebakaran				30			

15	Review Masterplan Kawasan Sukarno Hatta	tersedianya dokumen perencanaan kawasan strategis Sukarno Hatta							
16	Studi Kelayakan Penataan Alun-Alun sebagai Sentra Pertumbuhan Ekonomi Baru	tersedianya dokumen studi kelayakan penataan alun-alun sebagai CBD						30	
17	Penyusunan FS Skywalk Jalan A Yani (Penghubung teras Kali Kota dan Taman Lansia)/ Pecinan	tersedianya dokumen studi kelayakan Skywalk Jalan A yani dan Pecinan							
18	Penyusunan FS Gondola Lifts (Kyai Langgeng - Alun-alun - Pecinan)	tersedianya dokumen studi kelayakan gondolo lifts							
19	Perencanaan Penataan Alun-alun	tersedianya dokumen perencanaan penataan alun-alun							
20	Up Date Data Base Perumahan	tersedianya data sistem informasi perumahan dan permukiman							
21	Perencanaan Penataan Terminal Lama Rejomulyo	tersedianya dokumen perencanaan penataan terminal lama Rejomulyo							

22	Penyusunan Perencanaan Kawasan Prioritas	Tersedianya dokumen perencanaan kawasan prioritas	30 Dokumen					30	
23	Penyusunan Perencanaan Kawasan Strategis	Tersedianya dokumen perencanaan kawasan strategis	30 Dokumen					30	
24	Monev AMPL	Tersedianya dokumen capaian Strategi Sanitasi Kota	30 Dokumen		30	30		30	30
25	Penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum (RISPAM)	Tersedianya dokumen Review RSPAM	1 dokumen			1			
26	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kota Magelang	tersedianya dokumen capaian terhadap pemenuhan kebutuhan rumah di lingkungan yang aman dan sehat serta akses layanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat	kegiatan			1	4		
27	Penyusunan Masterplan Kawasan Sidotopo	Tersusunnya dokumen masterplan kawasan sidotopo	dokumen				1		

28	Penyusunan Dokumen Visualisasi Kawasan Strategis dan Prioritas Daerah	Tersusunnya Dokumen Visualisasi Kawasan Strategis dan Prioritas Daerah	dokumen		1					
29	Penyusunan Dokumen Rencana Pemanfaatan Lahan dan Bangunan Eks Magelang Theater	Tersusunnya Dokumen Rencana Pemanfaatan Lahan dan Bangunan Eks Magelang Theater	dokumen		1					
30	Pembaruan Data Dasar Usulan Keciptakarya	Tersusunnya Pembaruan Data Dasar Usulan Keciptakarya	dokumen		1					
31	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Dampak Lingkungan TPST 3R Induk	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengelolaan Dampak Lingkungan TPST 3R	dokumen		1					
32	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Bangunan TPST 3R Induk	Tersusunnya dokumen perencanaan tata bangunan TPST 3R Induk	dokumen		1					

33	Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan TPST 3R Induk	Tersusnya Dokumen studi kelayakan TPST 3R Induk	dokumen		1					
34	Penyusunan Masterplan Kampung Tematik, Terpadu dan Hijau	Tersusunnya Dokumen masterplan kampung tematik, terpadu dan hijau	dokumen				1			
35	Review Masterplan kawasan soekarno hatta	tersedianya dokumen masterplan kawasan soekarno hatta	dokumen				1			
Program perencanaan pembangunan daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100,3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	60	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%	90%
	Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	65	70%	72%	75%	80%	82%	85%	85%	85%
	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	25	30%	35%	40%	45%	50%	55%	55%	55%
	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	72%	74%	76%	78%	80%	82%	85%	85%	85%

1	Penyusunan Dokumen Masterplan Smart City	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Masterplan Smart City	50 Dokumen	50	50	50	4	4	50	
Program Pengembangan Perumahan		Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni	2	2	2	3	4	5	5	5
1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah fasilitasi kegiatan Kotaku	12 kelurahan	12	12					
Program Lingkungan Sehat Perumahan		Tersedianya perumahan dengan lingkungan sehat								
1	Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP)	Jumlah dokumen RKP-KP	10 dokumen		10					
		Rasio ketersediaan perencanaan bidang sosial budaya	70%	70%	70%	75%	75%	80%	80%	80%
		Tingkat implementasi perencanaan bidang Sosial Budaya	70%	70%	70%	75%	75%	80%	80%	80%
Program perencanaan sosial budaya		Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1	Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah Dokumen SPKD	20 buku	20					
2	Penyusunan Dokumen Kota Layak Anak	Jumlah Dokumen Kota Layak Anak	30 buku			30			
3	Penyusunan Dokumen RAD Kota Inklusif	Jumlah Dokumen RAD Kota Inklusif	20 buku			20			
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)	Jumlah Laporan kegiatan koordinasi dan pembinaan penanganan GAKY	4 laporan	4	4	4			
5	Penyusunan Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)	Jumlah laporan LP2KD	36 buku	36	36	36			
6	Penyusunan RAD Kota Magelang Sehat	Jumlah dokumen RAD	20 buku					20	
7	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	Jumlah dokumen Lap Monev PUS	40 buku	40	40	40			40

8	Perencanaan Pengembangan Kehidupan Berkelanjutan	Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Kehidupan Berkelanjutan	30 buku							
9	Penyusunan Masterplan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan	Jumlah dokumen masterplan pengembangan kesenian dan kebudayaan	30 buku		30					
10	Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender	Jumlah Dokumen RAD PUG	25 buku		25					
11	Penyusunan Dokumen Masterplan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Masterplan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	20 buku			20				
12	Penyusunan Masterplan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Masterplan Pemberdayaan Masyarakat	30 buku				30			
13	Masterplan Pemberdayaan Pemuda	jumlah dokumen pemberdayaan pemuda	30 buku							
14	Perencanaan Peningkatan Daya Saing dan Daya Jual Pariwisata	jumlah dokumen peningkatan daya saing dan daya jual pariwisata	30 buku							

15	Perencanaan Pengembangan Olahraga	Jumlah dokumen perencanaan olahraga	30 buku	30						
16	Perencanaan Pembangunan Berbasis Kependudukan	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Berbasis Kependudukan	30 buku					30		
17	Rencana Pengendalian Stabilitas Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian Stabilitas Daerah	30 buku							30
18	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Dokumen RAD PK	30 buku		30					
19	Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia	Jumlah Dokumen RAD-HAM	20 buku			20				
20	Penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs	Jumlah Dokumen RAD SDG	20 buku					20		
21	Perencanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	jumlah dokumen peningkatan layanan publik	20 buku							20
22	Perencanaan Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas	jumlah dokumen peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	30 buku				30			

	kinerja birokrasi								
23	Perencanaan Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Kerjasama Daerah	30 buku					30	
24	Penyusunan Dokumen RAD ASN	Jumlah dokumen RAD RAD ASN	20 buku			20			
25	Penyusunan dokumen perencanaan E-Government	Jumlah dokumen E-Government	20 buku						
26	Review dan evaluasi dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah	Jumlah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah	20 buku				20		
27	Penyusunan Dokumen RAD-KLA	Jumlah dokumen RAD-KLA	20 buku						
28	Masterplan Pengembangan Wisata Sudirman	Tersusunnya masterplan pengembangan wisata sudirman	1 dokumen						
29	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepariwisata	Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepariwisata	1 dokumen				1		

30	Penyusunan Dokumen Kemitraan	Tersusunnya Dokumen Kemitraan	1 dokumen		1				
31	Penyusunan Masterplan wisata diponegoro	Tersusunnya dokumen diponegoro	1 dokumen			1			
32	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Rancangan Perda Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1 Rancangan Perda					1	
33	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Wanita Rentan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Wanita Rentan	1 Dokumen					1	
34	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Wawasan Berkebangsaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Wawasan Kebangsaan	1 Dokumen						1
35	Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian Stabilitas Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengendalian Stabilitas Daerah	1 Dokumen						1
36	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Benda Cagar Budaya	1 Dokumen						1

Benda Cagar Budaya									
37 Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanganan Anak Tidak Sekolah	Jumlah Dokumen Perencanaan Benda Cagar Budaya	1 Dokumen							1
	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program perencanaan pembangunan daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100,3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
	Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	65%	70%	72%	75%	80%	82%	85%	85%
	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	55%
	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	72%	74%	76%	78%	80%	82%	85%	85%
1 Pengendalian dan Evaluasi RKPD	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	4 kegiatan		4	4	4	4	4	

2	Evaluasi RPJMD	Jumlah dokumen evaluasi RPJM	1 kegiatan				1			1
		Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi		80%	80%	90%	90%	100%	100%	100%
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Koordinasi Perencanaan bidang Ekonomi	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan bidang sosbud	12 bulan	12						
2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	dokumen hasil kormonev bidang sosbud	1 kegiatan		1	1	1	1	1	1
		Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Fisik Prasarana								

	Program perencanaan Fisik Prasarana	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang Fisik Prasarana	100%	100%						
1	Koordinasi Perencanaan bidang Fisik Prasarana	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan bidang fispra	12 bulan	12						
		Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Fisik Prasarana		80%	80%	90%	90%	100%	100%	100%
	Program perencanaan sosial budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	80%	80%	80%	90%	90%	100%	100%	100%
1	Koordinasi Perencanaan bidang Sosial Budaya	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan bidang sosbud	12 bulan	12						
2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	dokumen hasil kormonev bidang sosbud	20 dokumen		20	20	20	20	20	20

	Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100,3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
	Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	65%	70%	72%	75%	80%	82%	85%	85%
	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	55%
	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	72%	74%	76%	78%	80%	82%	85%	85%
1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah dokumen monev	100 buku	100	100	100	100	4	100	100

	Persentase rekomendasi hasil monev perencanaan bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	100%	100%						
Program perencanaan Ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100%	100%						
1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monev	4 dokumen	4						
	Persentase rekomendasi hasil monev perencanaan bidang Fisik Prasarana yang ditindaklanjuti								
Program perencanaan Fisik Prasarana	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang Fisik Prasarana	100%	100%						
1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monev	4 dokumen	4						

	Persentase rekomendasi hasil monev perencanaan bidang Bidang Sosial Budaya yang ditindaklanjuti	100%	100%						
Program perencanaan sosial budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	80%	80%						
1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monev	4 dokumen	4						
JUMLAH									

BAB IV
CAPAIAN INDIKATOR DAN EVALUASI CAPAIAN

**A. CAPAIAN INDIKATOR SASARAN DAN PROGRAM TAHUN 2020
TERHADAP TARGET 2020**

1. CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

TABEL 7
CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2020		TARGET
			TARGET	CAPAIAN	2021
1	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	a. Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	98%	52%	100%
		b. Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	90%	96%	100%
2	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	a. Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	68.00%	80,34%	70 %
		b. Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	82,76%	86,21%	89.66%
3	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	70%	59,10%	75%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2020		TARGET
			TARGET	CAPAIAN	2021
4	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	100 %	99,36%	100%
5	Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	80%	93,33%	80%

SASARAN 1 : Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel

Capaian untuk sasaran pertama dapat dilihat dari indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Capaian Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja menunjukkan capaian yang cukup. Realisasi kinerja pada tahun 2020 realisasi indikator ini adalah 59,04%(Capaian tahun 2020 dari 83 indikator sasaran yang di amanatkan terdapat 49 indikator yang tercapai) dari target yang di tetapkan di awal tahun sebesar 98%.

Sementara untuk Indikator kedua pada sasaran pertama yaitu indikator Persentase publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan, Implikasi dari indikator ini melibatkan Profil Daerah (Bappeda) dan Data Go (Dinskominsta).

SASARAN 2 : Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan

Untuk mengukur kinerja dari sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan. Sasaran ini mempunyai 2 (dua) indikator yang merepresentasikan keberhasilan dari capaian kinerjanya. Realisasi usulan masyarakat yang diakomodir di dalam APBD sebesar 80,34%.

Sementara itu untuk indikator kedua dari Sasaran kedua adalah Cakupan Perangkat Daerah yang Mempunyai Mitra dengan Forum Warga pada tahun 2020, mengalami kenaikan menjadi 25 OPD. Apabila diprosentasekan maka PD yang bermitra dengan Forum Warga sebesar 86,21% (jumlah OPD yang ada di Kota Magelang sebanyak 29 OPD).

SASARAN 3 : Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sasaran Strategis yang ketiga yaitu mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Tehnologi Informasi dan Komunikas mempunyai satu indikator kinerja yang di pergunakan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis yaitu Cakupan kualitas perencanaan partisipatif. Capaian indikator cakupan kualitas perencanaan partisipatif menunjukkan kondisi yang baik. Dari target 66,75% pada tahun 2020, realisasi indikator kinerjanya sebesar 59,10%, melebihi dari target yang direncanakan.

SASARAN 4: Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan

Sasaran strategis yang keempat adalah “Mewujudkan Konsistensi Perencanaan Jangka Menengah dengan Perencanaan Tahunan”. Indikator yang merepresentasikan sasaran ini adalah Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Capaian sasaran ini dari target sebesar 100% tercapai sebesar 99,36%.

SASARAN 5: Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas

Sasaran yang kelima yaitu “ Mewujudkan Dokumen Perencanaan dan Implementasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Bidang Fisik

Prasarana dan Bidang Sosial Budaya yang Berkualitas” mempunyai satu indikator kinerja yang merepresentasikan sasaran ini adalah Cakupan Ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas. Pada tahun 2020 direncanakan target kinerja sebesar 80%. Adapun capaian realisasinya sebesar 93,33% .

2. CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM

TABEL 8
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	2020		TARGET
			TARGET	CAPAIAN	2021
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100%	99.04%	100%
		Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	85%	12.69%	90%
		Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	82%	74.32%	85%
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	50%	67.00%	55%
		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	82%	82.39%	85%
2	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100%	100.00 %	100%
3	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	100%	100%	100%
4	Program Perencanaan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan	100%		

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	2020		TARGET
	Pembangunan Bidang Fisik Prasarana	sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana		100.00 %	100%

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda adalah sebagai berikut:

a. Program perencanaan pembangunan daerah

Keberhasilan dari program ini di tentukan oleh keberhasilan dari indikator dari program ini ada 5 (lima) yaitu sebagai berikut :

- 1) Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD.

Indikator ini menggambarkan konsistensi antara jumlah program yang terakomodir ke dalam RKPD. Dari total 83 program dalam RPJMD 2016-2021 keseluruhannya telah masuk ke dalam RKPD dengan kata lain dari target 100% tercapai 99,04%.Pencapaian indicator ini diharapkan kedepan agar dapat ditingkatkan menjadi 100%.

- 2) Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir.

Sebagaimana amanat Permendagri 86 Tahun 2017, pokok pikiran Dewan wajib dihadirkan sebagai bagian dari proses politik penyusunan RKPD. Dokumen ini akan diselaraskan ke dalam Rancangan RKPD hingga penetapannya. Dengan substansi yang memberikan ruang bagi Dewan untuk menjaring aspirasi masyarakat, maka akomodasi atas pokok pikiran dewan menjadi bersifat mengikat, tentu saja setelah dilakukan penelaahaan atau verifikasi oleh OPD. Pada Tahun 2020 target akomodasi pokok pikiran dewan adalah 85% dan terakomodir sejumlah 12,69%. Dengan realisasi kinerja 2020 tersebut maka capaian dari indikator kinerja sebesar 14,93%. Adapun capaian ini diperoleh dari perhitungan total pokok pikiran sebanyak 599 pokok pikiran, hanya 76 diakomodir setelah ditelaah dan diverifikasi. Hal ini disebabkan anggaran yang terbatas setelah dilakukan realokasi anggaran akibat pandemic Covid-19.

- 3) Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir.

Dengan definisi operasional Jumlah Kesepakatan Musrenbang yang diakomodirdi dalam renja/Jumlah Kesepakatan, indikator ini pada tahun 2020 tercapai 74,32% dari target pada tahun tersebut sebesar 82%, artinya tingkat capaian indikator kinerja persentase BA Musrenbang yang terakomodir adalah 92,90%. Prosentase tersebut di peroleh dari

246 jumlah usulan musrenbang yang di sepakati terdapat sebanyak 331 usulan Kesepakatan Musrenbang yang diakomodir di dalam renja

4) Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik

Sebagai media menjaring aspirasi masyarakat, peran konsultasi publik menjadi sangat strategis, terutama dalam menyempurnakan rancangan RKPD Kota Magelang Tahun 2019. Dari 3 segmen yaitu segmen kelompok Umum, segmen Lansia dan segmen Anak sekolah, konsultasi public ini menghasilkan banyak sekali usulan yang layak dan sesuai dengan tema perencanaan sehingga mewarnai renja OPD yang terlibat. Capaian tahun 2020 dari target sebesar 50% dapat tercapai 67% atau kinerja mencapai 134%. Capaian ini diperoleh dari perhitungan jumlah usulan pada saat konsultasi publik yang diakomodir sebanyak 134 usulan di bagi dengan jumlah usulan pada saat konsultasi publik sebanyak 200 usulan.

5) Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir

Indikator ini diformulasikan dengan Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir APBD/Jumlah usulan masyarakat. Pada tahun 2020 usulan masyarakat yang terakomodir sekitar 82,39% dari target sebanyak 82% sehingga capaian dari indikator tersebut sebesar 100,48%. Perhitungan ini diperoleh dari jumlah usulan/ aspirasi masyarakat melalui E-aspirasi yang di akomodir sebanyak 992 usulan dibandingkan dengan 1204 usulan masyarakat dalam E-aspirasi. Apabila dilihat dari partisipasi masyarakat di dalam proses perencanaan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini cukup menggembirakan mengingat bahwa penting bagi masyarakat terkait sumbang saran aspirasinya diakomodir untuk meningkatkan trust masyarakat terhadap pemerintah. Pada program

b. Program Perencanaan pembangunan bidang ekonomi.

Keberhasilan program ini dapat dilihat dari cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi. Upaya yang dilakukan pada tahun 2020 memang belum bisa optimal karena focus pemerintah masih pada penanganan Covid-19 dan dampaknya. Namun ada kegiatan yang tetap dilaksanakan pada tahun 2020 karena dipandang penting, sebagai berikut:

- 1) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi;
- 2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan Magelang Kota Sejuta Bunga

c. Program Perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya.

Keberhasilan program ini dapat dilihat dari cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang pemerintahan, sosial dan budaya. Upaya yang dilakukan adalah melalui penyusunan dokumen perencanaan yang memberi arah pengembangan sektoral bidang Sosial Budaya. Namun upaya pengembangan sektoral bidang pemerintahan, sosial dan budaya belum dapat berjalan optimal karena pemerintah masih focus pada penanganan Covid-19 dan dampaknya. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi;
- 2) Review dan Evaluasi Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- 3) Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepariwisata;

d. Program Perencanaan pembangunan bidang Fisik Prasarana.

Keberhasilan program ini dapat dilihat dari cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik dan prasarana wilayah. Upaya yang dilakukan adalah melalui penyusunan dokumen perencanaan yang memberi arah pengembangan sektoral bidang Fisik Prasarana belum bisa dilaksanakan secara optimal pada tahun 2020.

Adapun dokumen perencanaan yang disusun pada tahun 2020 meliputi:

- 1) Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis;
- 2) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kota Magelang;
- 3) Penyusunan Masterplan Kawasan Sidotopo;
- 4) Penyusunan Feasibility Study Jembatan Ngembik Rejosari;

Sebagai perencanaan pembangunan sektoral, perencanaan pembangunan untuk meningkatkan kinerja perencanaan di segala aspek mutlak diperlukan. Keberhasilan program ini dapat dilihat dari cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi, fisik prasarana dan sosial Budaya.

Upaya yang dilakukan adalah melalui penyusunan dokumen-dokumen perencanaan yang memberi arah pengembangan sektoral bidang Ekonomi prasarana dan sosial Budaya. Tahun seluruh kegiatan ini sudah dilakukan dan capaian mencapai masing masing 100%.

**B. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR TAHUN 2020 TERHADAP TARGET
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2016 -2021**

1. INDIKATOR SASARAN

**TABEL 9
CAPAIAN INDIKATOR SASARAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	TARGET		CAPAIAN N 2020	% CAPAIAN TERHADAP	
			2020	2021	2020	TH 2020	TH AKHIR RENST RA
1	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	c. Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	98%	100%	52%	53.06 %	52%
		d. Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	90%	100%	96%	106.67 %	96%
2	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	a. Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	68%	70 %	80,34 %	118.15 %	114.7 7%
		b. Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	82,76 %	89.66 %	86,21 %	104.17 %	96.15 %
3	Mengoptimalkan mekanisme	Cakupan kualitas perencanaan	66.75 %	70%	59,10 %	88.54 %	84.43 %

No	Sasaran	Indikator Kinerja	TARGET		CAPAIA N 2020	% CAPAIAN TERHADAP	
			2020	2021	2020	TH 2020	TH AKHIR RENST RA
	perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	pembangunan yang partisipatif					
4	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	100 %	100%	99,36 %	99.36 %	99.36 %
5	Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang	Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	80%	80%	93,33 %	116.66 %	116.6 6%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	TARGET		CAPAIAN N 2020	% CAPAIAN TERHADAP	
			2020	2021	2020	TH 2020	TH AKHIR RENS- TRA
	berkualitas						

SASARAN 1 : Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel

SASARAN 2 : Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan

SASARAN 3 : Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

SASARAN 4 : Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan

SASARAN 5 : Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas

2. INDIKATOR PROGRAM

TABEL 10
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	TARGET		CAPAIAN	% CAPAIAN TERHADAP	
			2020	2021	TH 2021	TH 2020	TH AKHIR RENS- TRA
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	99.04 %	99.04 %	99.04%
		Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	85%	90%	12.69 %	14.93 %	14.10%
		Persentase BA Hasil	82%	85%	74.32	90.63	87.44%

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	TARGET		CAPAIAN	% CAPAIAN TERHADAP	
		Musrenbang yang terakomodir			%	%	
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	50%	55%	67%	134%	121.82 %
		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	82%	85%	82.39 %	100.48%	96.93%
2	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100%	100 %	100%	100%	100%
3	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	100%	100%	100%	100%	100%
4	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana	100%	100%	100%	100%	100%

Beberapa permasalahan penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan yang dihadapi secara garis besar di antaranya:

- a. Masih dijumpai kesulitan koordinasi antar internal dan eksternal OPD.
- b. Beberapa persoalan yang bersifat lintas sektor, ego dan saling lempar tanggung jawab pada penanganan isu dan permasalahan masih saja terjadi.
- c. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang belum konsisten yang perlu terus dilakukan minimalisasi deviasi.
- d. Masih memerlukan ruang pemahaman perencanaan di setiap level pada OPD. Menjadi tidak ideal ketika yang memahami indikator dan ukurannya hanya pada tingkat kasubbag program.
- e. Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian / telaahan, masih perlu dilakukan penguatan sehingga mampu menjadi dasar analisis kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.
- f. Tantangan pada fungsi perencanaan semakin tidak ringan, seiring kompleksitas dan tuntutan akselerasi atas kesejahteraan masyarakat dihadapkan dengan berbagai kondisi permasalahan bangsa yang semakin kompleks serta dinamika global

Adapun solusi yang sudah dilaksanakan untuk menghadapi permasalahan – permasalahan tersebut di antaranya:

- a. Melaksanakan persamaan persepsi terhadap para eselon II dan jajarannya di seluruh OPD agar perencanaan dan pengawalan terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dikendalikan secara komprehensif.
- b. Mengupayakan peningkatan kapasitas personil perencanaan dan penguatan data atas hasil monitoring evaluasi serta aksesibilitas data yang valid dan tepat waktu
- c. Peningkatan kapasitas core business perencanaan dan penguatan mindset organisasi pembelajar yang tangguh dan antisipatif terhadap dinamika yang berkembang.
- d. Implementasi integrasi e-planning dan ebudgetting, e-pokir, e-monev dan e-sakip secara utuh dan konsekuen melibatkan seluruh stakeholders pada setiap fungsi mulai perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi hingga akuntabilitas kinerjanya dengan menggunakan aplikasi dari pemerintah pusat.

- e. Peningkatan dan intensitas forum dialog perencanaan, FocusGroup Discussion serta forum OPD membahas isu-isu strategis pembangunan serta adanya kepastian pelimpahan kewenangan antara OPD dan kecamatan/kelurahan.
- f. Perluasan workshop pada seluruh level pada OPD dan pemahaman pada Kepala OPD terkait perencanaan pembangunan daerah.
- g. Pemberdayaan para pejabat fungsional perencanaan Bappeda untuk melakukan roadshow pencerahan perencanaan ke OPD
- h. Upaya peningkatan sistem manajemen data terpadu yang didukung oleh data OPD yang valid dan dinamis serta akuntabel
- i. Perlunya inovasi tiada henti baik dalam tataran inovasi perencanaan pembangunan dan inovasi yang berupa terobosan kebijakan yang out of the box yang berorientasi pada kecepatan dan kualitas pelayanan publik dan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan indikator yang ada. Hal ini bisa terwujud dengan implementasi skenario Continuous Improvement dimulai pada hal-hal kecil hingga menjadi budaya kerja berbasis perbaikan berkesinambungan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Evaluasi capaian RENSTRA BAPPEDA merupakan kegiatan terencana untuk mengetahui tingkat ketercapaian target, permasalahan yang menjadi kendala, serta solusi yang diambil dengan menggunakan instrumen yang berkaitan dengan indikator, tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Pasal 4 Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD. Dalam Pasal 5 Penyelenggaraan SAKIP meliputi: (a) rencana strategis; (b) perjanjian Kinerja; (c) pengukuran Kinerja; (d) pengelolaan data Kinerja; (e) pelaporan Kinerja; dan (f) reviu dan evaluasi Kinerja. Bagian Kedua Rencana Strategis dalam Pasal 6 (2) SKPD menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan. (3) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP. Bagian Keempat Pengukuran Kinerja Pasal 15 (1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 melakukan pengukuran kinerja. (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja. Pasal 16 Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan cara: (a) membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan; (b) membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD.

**EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2020 TERHADAP
TARGET INDIKATOR RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2016 -2021**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	TARGET		CAPAIAN N 2020	% CAPAIAN TERHADAP	
			2020	2021	2020	TH 2020	TH AKHIR RENST RA
1	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	e. Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	98%	100%	52%	53.06 %	52%
		f. Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	90%	100%	96%	106.67 %	96%
2	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	a. Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	68%	70 %	80,34 %	118.15 %	114.7 7%
		b. Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	82,76 %	89.66 %	86,21 %	104.17 %	96.15 %
3	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	66.75 %	70%	59,10 %	88.54 %	84.43 %

No	Sasaran	Indikator Kinerja	TARGET		CAPAIAN N 2020	% CAPAIAN TERHADAP	
			2020	2021	2020	TH 2020	TH AKHIR RENST RA
	partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi						
4	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	100 %	100%	99,36 %	99.36 %	99.36 %
5	Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	80%	80%	93,33 %	116.66 %	116.6 6%

B. SARAN

Berdasarkan permasalahan-pemsalahan yang dihadapi beserta solusi pemcahannya, maka beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan program kegiatan yang akan datang antara lain

1. Penguatan koordinasi dalam rangka penyamaan persepsi seluruh OPD akan tujuan dan sasaran daerah.
2. Mengupayakan peningkatan kapasitas personil perencanaan dan penguatan data hasil monitoring evaluasi.
3. Implementasi integrasi e-planning dan ebudgetting, e-pokir, e-monev dan e-sakip secara utuh dan konsekuen melibatkan seluruh stakeholders pada setiap fungsi mulai perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi hingga akuntabilitas kinerjanya dengan menggunakan aplikasi dari pemerintah pusat.
4. Peningkatan dan intensitas forum dialog perencanaan, FocusGroup Discussion serta forum OPD membahas isu-isu strategis pembangunan serta adanya kepastian pelimpahan kewenangan antara OPD dan kecamatan/kelurahan.
5. Perluasan workshop pada seluruh level pada OPD dan pemahaman pada Kepala OPD terkait perencanaan pembangunan daerah.
6. Pemberdayaan para pejabat fungsional perencanaan Bappeda untuk melakukan roadshow pencerahan perencanaan ke OPD
7. Upaya peningkatan sistem manajemen data terpadu yang didukung oleh data OPD yang valid dan dinamis serta akuntabel
8. Perlunya inovasi tiada henti baik dalam tataran inovasi perencanaan pembangunan dan inovasi yang berupa terobosan kebijakan yang out of the box yang berorientasi pada kecepatan dan kualitas pelayanan publik dan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan indikator yang ada. Hal ini bisa terwujud dengan implementasi skenario Continuous Improvement dimulai pada hal-hal kecil hingga menjadi budaya kerja berbasis perbaikan berkesinambungan